



PAKAI DANA KEISTIMEWAAN DIY

Program Kegiatan Fisik Dicermati Ulang

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta akan mencermati kembali program kegiatan fisik karena penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19. Termasuk kegiatan fisik yang menggunakan dana keistimewaan (Danais) DIY karena adanya surat edaran dari Sekda DIY terkait danais. "Sudah ada pemenang lelang untuk lima paket pekerjaan. Sambil berproses kami akan cermati dari sisi kemampuan anggaran daerah karena fokus untuk penanganan Covid-19," kata Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Rabu (22/4).

Menurutnya jika masih ada kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19, maka 5 paket pekerjaan yang sudah pemenang itu akan dibatalkan dan anggaran akan dialihkan. Lima paket pekerjaan yang sudah dilelangkan dan ada pemenangnya adalah proyek pembangunan saluran air hujan.

"Aturan penghentian kegiatan pengadaan barang dan jasa dialihkan untuk penanganan Covid-19 dari Kemenkeu sudah ada. Kami realokasi lagi kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dari PUPKP kami rekpa jadi Rp 116 miliar. Jumlah itu bisa berubah lagi jika kebutuhan untuk Covid-19 lebih banyak," jelasnya.

Selain itu Pemkot Yogyakarta juga menerima surat edaran dari Sekda DIY tertanggal 21 April 2020 terkait penyesuaian kembali kegiatan dengan Danais. Oleh sebab itu pihaknya akan mempelajari surat edaran itu dan mencermati kembali program kegiatan dengan Danais di tahun 2020. "Kami akan lakukan pencermatan kembali terhadap program kegiatan yang menggunakan danais," imbuh Hari.

Dia menyatakan, kegiatan fisik dengan danais

DIY di Kota Yogyakarta tahun 2020 saat ini masih berproses tahapanya lelang di Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta. Kegiatan fisik dengan danais itu yakni pekerjaan penataan pedestrian Jalan Sudirman dan KH Dahlan serta peningkatan saluran air hujan di Jalan Kemasan Kotagede.

Secara terpisah Pimpinan Paniradya Keistimewaan DIY atau Paniradya Pati Pemda DIY, Benny Suharsono mengatakan pihaknya masih mencermati kembali laporan usulan kegiatan dengan danais untuk dilakukan penyesuaian. Menurutnya dengan surat edaran dari Sekda itu, tidak menghentikan program kegiatan, tapi disesuaikan dahulu.

"Yang sudah masuk lelang, mestinya sekarang sudah berjalan. Yang sudah lelang berarti tidak masalah. Klausulnya disesuaikan dulu sampai di perubahan. Karena kami juga sesuaikan dengan pemerintah pusat. Di PMK pusat danais DIY totalnya masih tetap. Tapi faktanya apakah uangnya ada atau tidak karena kas negara dalam kondisi seperti ini terus bergerak," terang Benny.

Dia menambahkan jika lelang kegiatan danais setelah April, maka masuk termin kedua untuk diusulkan pendanaanya ke pemerintah pusat. Sedangkan untuk usulan pendanaan termin pertama tahun ini, lanjutnya, yang harusnya sudah diverifikasi pemerintah pusat, belum dilakukan. "Tapi dengan PMK yang baru yakni PMK Mentri Keuangan nomor tahun 2020 disitu ada bunyi pemanfaatan danais salah satunya bisa untuk penanggulangan Covid. Tapi danais tidak bisa untuk bantuan jupad. Bisa untuk pemberdayaan. Misalnya seniman bisa melakukan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat secara daring. Reposisi anggaran danais untuk Covid itu juga kami lakukan," tandasnya. (Tri)-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005